

Problem dan solusi terkait dengan keterbatasan anggaran item pembinaan kepribadian dan kemandirian (PKK) narapidana

Djoni Praptomo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=128952&lokasi=lokal>

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah tentang keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dimana sementara ini pemerintah hanya mampu menganggarkan seadanya. Atas permasalahan tersebut diatas ingin diketahui; Apa saja problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana ? dan Apa saja solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal ? Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir tesis adalah teori kebijakan publik dan teori kebijakan kriminal yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang suatu problema dan solusi yang dialami dan dilakukan oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa permasalahan / problema dalam hal PKK narapidana tidak pernah menjadi bahan formulasi, dan solusi yang dilakukan pun tidak pernah menjadi bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan yang berikutnya. Di satu pihak dimana suatu kebijakan publik seharusnya melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi, namun pada kenyataan yang ada di lapas formulasi berjalan sendiri, implementasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan evaluasi juga berjalan sendiri. Sehingga kondisi keterbatasan anggaran dan permasalahan PKK belum dapat diatasi secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran/rekomendasi; bahwa untuk menyiasati keterbatasan anggaran item PKK narapidana, pada kedua lapas tersebut perlu lebih banyak lagi membangun jejaring untuk kerjasama / kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberi peluang pada terselenggaranya PKK yang lebih baik. Agar dibuat regulasi yang mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama dengan kegiatan PKK narapidana mengalokasikan pula anggaran kegiatan instansinya untuk PKK narapidana.

<hr>

The issue which lifted in this thesis is about the budget limitation of Personal Guidance and Independent's (PKK) Item for the Inmates in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang, which is the government so far only capable providing limited budget. Based on problem above, this thesis try to examine what are the problem in those prison that cause by the limited budget for PKK? Then what the solution offer by those prison in order to optimized the use of that limited budget for inmates guidance.

The thesis use the theory of public policy and theory of criminal policy to explain the way of think. The research use the descriptive qualitative research method because that method could give a clearer

perspective and give a vast information about the problems and the solution which occurs in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang.

The research indicates that the problems never been formulated, and the solution that been done never became an evaluation for the decision of next policy. On the other hand, a public policy should be through the process of formulation, implementation, and evaluation, but on the reality, each of those process occurs partially, not as a whole process. Thus, the condition of limited budget and the problems in PKK is not yet being taken with good. Based on the above explanation, the writer come up with an sugestion and recomendation that in order to overcome the limited budget of PKK item, in both of prison mentioned above needs to make more a cooperation or partnership with the other party that could bring an opportunity to held a better PKK programmes. The regulation needed for the government institution which have the same function and main duty of the PKK programmes to allocate the budget for the PKK programmes for inmates.